

2020 - 2024

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)**

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun

Telp./Fax. : 0745 - 91006

Website : www.pn-sarolangun.go.id



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor: W5-U9/1688/Kp.00.3/12/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN .

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun adalah membuat Rencana Strategis yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan indikator kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 – 2024.

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 1 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.
NIP. 197411142000121002

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/1688/Kp.00.3/12/2020
Tanggal : 1 Desember 2020

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H. NIP. 197411142000121002	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Nunung Kristiyani, S.H., M.H. NIP. 197702082001122004	Wakil Ketua	Ketua Pelaksana Kegiatan
3.	M. Soleh, S.H. NIP. 197302041993031004	Panitera	Koordinator I
4.	Juliadi, S.Kom. NIP. 198507012009041003	Sekretaris	Koordinator II
5.	Andi Maddumase, S.H. NIP. 196806221993031006	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Dedet Syahgitra, S.H. NIP. 198312062009121004	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Antonius Ringgo Yunanto, S.H. NIP. 198306152005021002	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	Teguh Hariadi, S.Kom NIP. 198108252006041004	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
9.	Binnaria Dabukke, S.H. NIP. 197505202006042002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Fitrisia, S.T. NIP. 198508302011012010	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Sarolangun, 1 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.
NIP. 197411142000121002



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor: W5-U9/ 61B /Kp.00.3/1/2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024;
2. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 2 Desember 2020 tentang Pembahasan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN .

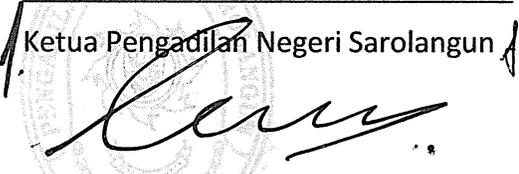
PERTAMA : Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Rencana Strategis bertujuan untuk lebih menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 6 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.
NIP. 197411142000121002

Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Negeri Sarolangun
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	91	91	92
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	91		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	91	91	92

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	92	93	93	94	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	98	98	99	99	
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100	100	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan	81		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	80	81	81	82	
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	12	12	13	13	

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ zitting plaats	-		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani melalui Posbakum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan secara sukarela	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100